

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PEMBIAYAAN MACET DAN PENYELESAIANNYA
PADA BANK SYARIAH
(Studi Pada BPRS Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

**YUNI YUNARTI
NPM : 1551020331**

Jurusan : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PEMBIAYAAN MACET DAN PENYELESAIANNYA
PADA BANK SYARIAH
(Studi Pada BPRS Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



Oleh :

**YUNI YUNARTI
NPM : 1551020331**

Jurusan : Perbankan Syariah

**Pembimbing I : Hanif, S.E.,M.M
Pembimbing II : Yulistia Devi, S.E..M.S.Ak**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan bisnis perbankan dengan menganut sistem syariah yang berbasis hukum Islam. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan macet adalah Pembiayaan bermasalah dimana karena suatu hal seorang debitur mengingkari janji mereka membayar angsuran yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan atau sama sekali tidak ada pembayaran. Pada BPRS Bandar Lampung di tahun 2014-2015 pembiayaan macet mengalami peningkatan dari Rp643.319.291 menjadi Rp1.038.221.371 namun pada tahun 2016-2017 pembiayaan macet mengalami penurunan, lalu pada tahun 2017-2018 pembiayaan macet mengalami peningkatan menjadi Rp2.294.292.088. Rumusan masalah faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, bagaimana cara penyelesaian pembiayaan macet pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, tujuan penelitian untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung dan untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian pembiayaan macet pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Populasi 657 nasabah, Sampel 50 nasabah berdasarkan pekerjaan wiraswasta dan 1 karyawan BPRS Bandar Lampung. dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, kuisioner, dan dokumentasi. hasil dari penelitian ini adalah penyebab pembiayaan macet yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal pada BPRS Bandar Lampung faktor internal pihak bank kurang teliti dalam menganalisis calon nasabah dengan analisis prinsip 5C, faktor eksternal yaitu 1) faktor ketidaksengajaan nasabah yang berkeinginan membayar sebelum jatuh tempo tetapi tidak mampu mengangsur dikarenakan musibah dipecat dari pekerjaan, musibah bencana alam seperti kebakaran, banjir sehingga nasabah tidak mempunyai penghasilan untuk membayar pembiayaan yang telah jatuh tempo 2) faktor sengaja nasabah yang dengan sengaja mengulur-ngulur waktu untuk membayar pembiayaan yang telah jatuh tempo, penyelesaian pembiayaan macet. Penyelesaian pembiayaan macet yaitu dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dengan peringatan melalui telepon, persyaratan kembali (*reconditioning*) dengan cara silaturahmi musyawarah dengan pihak nasabah, penataan kembali (*restructuring*) yaitu melalui jalur non hukum dengan silaturahmi kepada nasabah untuk merelakan jaminan yang dijaminkankan untuk dijual dan apabila nasabah tidak memiliki iktikad baik maka diproses melalui jalur hukum.

Kata Kunci: Bank Syariah, Pembiayaan macet, penyebab, penyelesaiannya

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Yuni Yunarti
NPM	: 1551020331
Jurusan/Prodi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang Berjudul “ **Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiyaaan Macet Dan Penyelesaiannya Pada Bank Syariah (Studi Pada BPRS Bandar Lampung)**” adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 November 2019
Penulis

Materai

Rp.6000

Yuni Yunarti
NPM.1551020331



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suradimin, Sukarampe, Bandar Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN


**Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PEMBIAYAAN MACET DAN PENYELESAIANNYA PADA
BANK SYARIAH (Studi Pada BPRS Bandar Lampung)**

Nama : Yuni Yunarti
NPM : 1551020331
Jurusan : Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,


Hanif, S.E., M.M.
NIP. 197408232000031001

Pembimbing II,


Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak.
NIP. 198208082011012009

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah


Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.
NIP. 198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEMBIAYAAN MACET DAN PENYELESAIANNYA PADA BANK SYARIAH (Studi Pada BPRS Bandar Lampung)”** Disusun oleh **Yuni Yunarti** NPM: **1551020331**, Jurusan: **Perbankan Syari'ah**, telah diujikan pada sidang munagasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal: **Selasa, 31 Desember 2019**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : **Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si.**

Sekretaris : **Ahmad Hazas Syarif, S.E.I, M.E.I.**

Penguji I : **Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.**

Penguji II : **Hanif, S.E., M.M.**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Rully Abdul Ghofur, M.S.I.

NID.198908012003121001

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.

(Q.S.As-Syarh(94) : 6)¹



¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 596.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam waktu singkat.

Karya ini penulis persembahkan:

1. Orang tuaku yang sangat berjasa, terimakasih atas dukungannya sudah kasih semangat dan perjuangan yang orang tua saya berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Terimakasih kepada kelima saudara laki-lakiku, Padriansyah, Pahrizal, Soni Sumantri, Tanzir, Yasir atas bantuan motivasi dukungan selama masa perkuliahan sampai pada tahap ini.
3. Terimakasih kepada kakak iparku Yuli hartiningsih, Nurdiana, Surya atas motivasi dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Dan untuk almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu UIN Raden intan Lampung semoga semakin maju, selalu jaya dan berkualitas.

RIWAYAT HIDUP

Penulis diberi nama Yuni Yunarti lahir di Way Narta Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 19 Januari 1996. Penulis merupakan anak ke 6 dari 6 bersaudara yang merupakan buah kasih pernikahan dari pasangan Bapak Patahul dan Ibu Munirah.

Riwayat pendidikan formal yang telah diselesaikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) penulis ditempuh di SDN 1 Pesisir Utara, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat diselesaikan pada tahun 2008
2. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditempuh di SMPN 3 Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat dan diselesaikan pada tahun 2011
3. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2014
4. Pada tahun 2015 penullis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
5. Demikianlah riwayat hidup penulis yang dapat dibagikan dari aspek Pendidikan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kemudahan dalam menuntut ilmu dan kesehatan sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan judul "Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Bank Syariah (Studi Pada BPRS Bandar Lampung)" dapat terselsaikan. Sholawat teriring salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasullulah Muhamad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E). Dalam penyusunannya skripsi ini penulis mendapatkan dukungan semua pihak dan atas bantuan semua pihak yang mendukung dalam proses penyelsaian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Berikut ini Penulis Mengucapkan terimakasih pada:

1. Bpk Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta wakil dekan 1, 2, dan 3 yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami.

2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi.
3. Bpk Hanif, S.E.,M.M selaku pembimbing I dan Ibu Yulistia Devi, S.E..M.S.Ak selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis hingga dapat terselsaikkannya penyusunan skripsi ini.
4. BPRS Bandar Lampung, seluruh karyawan dan nasabah yang bersedia memberikan data-data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan fakultas Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung telah memberikan ilmu yang berarti.
6. Bapak dan ibu karyawan perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas yang selalu senantiasa membantu dalam menyediakan literatur bagi penulis.
7. Orang tuaku, kakakku, ponakan-ponakanku dan semua keluarga yang selalu berdoa dengan tulus dan memberiku motivasi keberhasilanku.
8. Terimakasih kepada keponakan-keponakanku Aulia Asri Lestari, Fitri Khoirunisa, Erlyta Arsyifa Salsabila, Faris Naupal Rabbani, Alyssa Mutia Azzahra sudah menjadi inspirasi penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi ini

9. Terima kasih kepada keluargaku, terima kasih banyak atas pelajaran yang kalian berikan kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Perbankan syariah angkatan 2015
11. Untuk keluarga besar PS G angkatan 2015 terimakasih telah menjadi keluarga selama 4 tahun yang membentuk dan menyaksikan perjuangan penulis hingga titik saat ini
12. Teman-teman KKN Desa Adiluwih angkatan 2018.
13. Untuk Sahabatku Rahmaya Putri Eriya, Herlinda Sari, Evi Rentiwi dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. yang selalu mendukung, menyemangati dan yang selalu penulis repotkan disegala situasi.
14. Untuk teman satu kosan penulis Yulianti yang selalu penulis repotkan.
15. Semua pihak yang mendukung dan tidak dapat di sebutkan satu persatu oleh penulis namun telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan iringan terima kasih banyak penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca. Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan yang berarti dalam bidang

khazanah ekonomi Islam, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan proposal skripsi ini.

Bandar Lampung, 21 November 2019

Penulis

Yuni Yunarti

NPM. 1551020331



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian	12
G. Metode Penelitian	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah	
1. Pengertian Bank Syariah	21
2. Karakteristik Bank Syariah	22
3. Dasar Hukum Bank Syariah	23
4. Prinsip-prinsip Dasar Bank Syariah	27
5. Produk Bank Syariah.....	29
6. Tujuan Perbankan Syariah.....	31
7. Fungsi Bank Syariah	31
8. Jenis dan Kegiatan Bank Syariah	32
9. Visi, Misi, dan Sasaran Bank Syariah	34
B. BPRS	
1. Pengertian BPRS	38
2. Dasar Hukum BPRS	38
3. Kegiatan Usaha dan Produk-Produk BPRS	39

4. Kepengurusan BPRS	42
C. Pembiayaan	
1. Pengertian Pembiayaan	45
2. Tujuan Pembiayaan	46
3. Produk Pembiayaan	48
4. Prinsip-prinsip Pembiayaan	49
5. Pengertian Pembiayaan Macet	50
6. Penyebab Pembiayaan Macet	50
7. Penyelesaian Pembiayaan Macet	53
C. Kerangka Pikir	54
D. Tinjauan Pustaka	56

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Profil BPRS Bandar Lampung	
1. Sejarah BPRS Bandar Lampung	60
2. Struktur Organisasi	63
3. Lokasi BPRS Bandar Lampung	64
4. Visi, Misi, dan Motto	64
5. Produk-Produk BPRS Bandar Lampung	65
6. Distribusi Hasil Jawaban Kuisisioner Dari Responden	68

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Faktor-faktor penyebab pembiayaan macet pada BPRS Bandar Lampung	75
B. Cara penyelesaian pembiayaan macet pada BPRS Bandar Lampung	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Kolektibilitas Pembiayaan Macet	7
Tabel 2. Nasabah Pertahun dan Nasabah Macet	7
Tabel 3. Data Nasabah	8
Tabel 4. Usia Responden.....	68
Tabel 5. Jenis Kelamin Responden	69
Tabel 6. Pekerjaan Responden	69
Tabel 7. Karakter Responden.....	70
Tabel 8. Modal Responden	71
Tabel 9. Jaminan Responden.....	71
Tabel 10. Kondisi Responden.....	72
Tabel 11. Kemampuan Responden	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	55
Gambar 2. Struktur Organisasi BPRS Bandar Lampung	63



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 2. Berita Acara Seminar Munaqasah
- Lampiran 3. Blangko Konsultasi
- Lampiran 5. Surat Persetujuan Izin Pra Riset BPRS Bandar Lampung
- Lampiran 6. Surat Perubahan Judul
- Lampiran 7. Surat Keterangan Persetujuan Judul
- Lampiran 9. Surat Persetujuan Izin Riset BPRS Bandar Lampung
- Lampiran 10. Pedoman Wawancara di BPRS Bandar Lampung
- Lampiran 11. Pedoman Kuisisioner Nasabah
- Lampiran 12. Dokumentasi Rekapitulasi Kolektibilitas Pembiayaan pada BPRS Bandar Lampung Tahun 2014-2018
- Lampiran 13. Dokumentasi Wawancara di BPRS Bandar Lampung
- Lampiran 14. Dokumentasi Kuisisioner Nasabah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Adapun judul skripsi ini adalah Untuk itu perlu uraian pengertian dari istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Analisis adalah Menurut kamus umum bahasa Indonesia analisis adalah, “penyidikan suatu peristiwa (karangan perbuatan)” suatu pemeriksaan terhadap mengungkap unsur-unsur dan hubungannya. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “penyelidikan terhadap suatu peristiwa “(karangan, perbuatan dan sebagainya, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya)”¹.
2. Faktor-faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.²
3. Penyebab adalah hal (keadaan, peristiwa yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.³
4. Pembiayaan macet atau yang biasa disebut pembiayaan bermasalah dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan

¹ W.J.S Poerwardamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, :Balai Pustaka Utara, 2011), h. 255.

² W.J.S Poerwardamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), h. 255.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 22.

menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi.⁴

5. Penyelesaiannya/penanganan adalah upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan yang dihadapi.⁵
6. Bank Syariah adalah yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qura'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Atau dengan kata lain Bank Islam adalah lembaga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta pengendalian uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁶

Agara memudahkan dalam memahami judul proposal skripsi ini dan tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadinya disinterpretasi terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
TERJADINYA PEMBIAYAAN MACET DAN**

⁴ Faturahman Djamil *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syri'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 66.

⁵ Ridwansyah, *Mengenal Istilah-istilah Dalam Perbankan Syariah*, (Bandar Lampung Anugrah Utama Raharja, 2012), h. 45.

⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), h. 2.

**PENYELESAIANNYA PADA BANK SYARIAH (Studi Pada BPRS
Bandar Lampung).**

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif

Memberikan pembiayaan kepada nasabah adalah salah satu kegiatan bank, akan tetapi merupakan sumber resiko yang cukup besar yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan macet, pembiayaan macet terjadi karena adanya kelalaian dari pihak nasabah dalam melakukan keterlambatan angsuran pembiayaan di bank. Jadi peneliti tertarik untuk meneliti faktor yang menyebabkan pembiayaan macet dan bagaimana penyelesaiannya pada bank syariah.

2. Secara Subjektif

Judul yang akan diteliti disesuaikan jurusan perbankan syariah, serta didukung oleh tersedianya literature atau refrensi dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.

C. Latar Belakang Masalah

Sejarah dikenalnya asal mula kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. oleh karena itu, bank dikenal sebagai tempat menukar uang atau sebagai meja tempat menukarkan uang, dalam sejarah para pedagang dari berbagai kerajaan melakukan transaksi dengan menukarkan uang, di mana penukaran uang dilakukan antara mata uang kerajaan yang satu dengan mata uang kerajaan yang lain kegiatan penukaran uang ini sekarang dikenal

dengan pedagang valuta asing (*money charnger*). Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan bertambah lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Kemudian kegiatan perbankan berkembang dengan kegiatan peminjaman uang, yaitu dengan cara uang yang semula disimpan masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan.⁷

Kemunculan konsep perbankan syariah dimulai ketika deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983 memberikan keleluasaan pada lembaga perbankan untuk menentukan tingkat suku bunga. Termasuk nolpersen atau peniadaaan bunga sekaligus. Akan tetapi, pada saat itu pemerintah belum memperkenankan pembukaan bank baru. Tahun 1988 pemerintah mengeluarkan pakto 1998 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Posisi bank syariah semakin pasti setelah disahkan UU RI tentang Perbankan No.7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga atau keuntungan bagi hasil.

Semakin adanya tuntutan perkembangan, maka undang-undang tersebut direvisi beberapa pasal yang kemudian menjadi undang0undang RI tentang Perbankan no. 10 Tahun 1998 . Untuk menjalankan Undang-undang tersebut selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat tahun 1999 dilengkapi Bank

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta :RajaGrafindo Persada, 2012) h. 16-17.

Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.⁸

Kata bank itu sendiri berasal dari bahasa Latin *banco* yang artinya bangku atau meja. Pada abad ke 12 kata *banco* merujuk pada meja, *counter* atau tempat penukaran uang (*money charnger*).⁹

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan bisnis perbankan dengan menganut sistem syariah yang berbasis hukum Islam. Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa riba itu haram, sehingga bisnis bank konvensional yang menerapkan sistem rente atau riba dengan perhitungan bunga berbunga, baik untuk produk simpanan maupun pinjamannya tidak sesuai hukum Islam. Bank Syariah tidak menerapkan sistem bunga tetapi menerapkan sistem bagi hasil, yaitu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam. Perhitungan bagi hasil didasarkan pada mufakat pihak bank bersama nasabah yang menginvestasikan dananya di bank syariah. Besarnya hak nasabah terhadap banknya dalam perhitungan bagi hasil tersebut, ditetapkan dengan sebuah angka ratio atau besaran bagian yang disebut Nisbah.¹⁰

Bank Syariah tertuang pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya

⁸ Anan Dwi Saputro, Moch Dzulkirom. A.R, *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.21 No.2 (April 2015) h. 2.

⁹ Rinsky K. Judiseno, *system Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 92-93.

¹⁰ Nurma Sari. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jurnal IAIN Pontianak, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak, No. (2016), h. 3.

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).¹¹

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan. Begitu pula pada BPRS Bandar Lampung dalam pelaksanaannya merupakan salah satu bank syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah yang juga melakukan kegiatan penghimpun dana (*funding*) dan penyaluran dana (*landing*). Aktivitas *funding* merupakan aktivitas pokok bank syariah dengan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyediakan fasilitas produk penghimpunan dana.¹²

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹³

Berdasarkan data Rekapitulasi pembiayaan yang diperoleh di BPRS Bandar Lampung mengalami peningkatan pembiayaan macet.

¹¹ Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 58.

¹² Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 4.

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011) h. 105-106.

Tabel 1
Rekapitulasi Kolektibilitas Pembiayaan Macet

No	Tahun	Pembiayaan Macet (Rp)
1	Desember 2014	643.319.291
2	Desember 2015	1.038.221.373
3	Desember 2016	2.233.945.355
4	Desember 2017	1.934,037.823
5	Desember 2018	2.294.292.088

Sumber Data: BPRS Bandar Lampung Tahun 2014-2018¹⁴

Dari tabel tersebut menunjukan pada tahun 2014-2015 pembiayaan macet mengalami peningkatan dari Rp643.319.291 menjadi Rp1.038.221.371 namun pada tahun 2016-2017 pembiayaan macet mengalami penurunan, lalu pada tahun 2017-2018 pembiayaan macet mengalami peningkatan menjadi Rp2.294.292.088.

Tabel 2
Nasabah pertahun dan Nasabah Pembiayaan Macet

No	Tahun	Nasabah Pertahun	Nasabah Pembiayaan Macet
1	Desember 2014	2.249 Nasabah	73 Nasabah
2	Desember 2015	2.906 Nasabah	131 Nasabah
3	Desember 2016	2.817 Nasabah	147 Nasabah
4	Desember 2017	2.640 Nasabah	83 Nasabah
3	Desember 2018	2.810 Nasabah	150 Nasabah

Sumber Data: BPRS Bandar Lampung Tahun 2014-2018¹⁵

Dari tabel tersebut menunjukan pada tahun 2014 total nasabah 2.249 nasabah yang mengalami pembiayaan macet sebanyak 73 Nasabah, pada desember 2015 total nasabah 2.906 nasabah yang mengalami pembiayaan macet sebanyak 131 nasabah, pada desember 2016 total nasabah 2.817

¹⁴ Dephi Wibowo, Pemasaran 1, *Rekapitulasi Kolektibilitas Pembiayaan Macet Tahun 2014-2018*, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bandar Lampung 15 Oktober 2019.

¹⁵ *Ibid*

nasabah yang mengalami pembiayaan macet sebanyak 147 nasabah, pada desember 2017 total nasabah 2.640 nasabah yang mengalami pembiayaan macet sebanyak 83 nasabah, pada desember 2018 total nasabah 2.810 dan yang mengalami pembiayaan macet sebanyak 150 nasabah.

Tabel 3
Data Nasabah

No	Nama Nasabah	Pekerjaan	Usia	Pinjaman (Rp)	Jaminan
1	Agus Hidayat	Wiraswasta	30 th	162.000.000	Sertifikat Rumah
2	Agus Pahrudin	Wiraswasta	42 th	612.500.000	
3	Arus Hardiansyah	Wiraswasta	30 th	41.000.000	
4	Aryadi Saputra	Wiraswasta	31 th	32.500.000	
5	Aryadi Saputra	Wiraswasta	38 th	41.700.000	
6	Buyung Sukandar	Wiraswasta	30 th	128.000.000	
7	Damsir Mallawi	Wiraswasta	41 th	48.000.000	BPKB Mobil
8	Devita Sari	Wiraswasta	29 th	236.000.000	
9	Dharmayani	Wiraswasta	33 th	39.000.000	
10	Dina Yulita Fitria	Wiraswasta	34 th	96.000.000	Sertifikat Rumah
11	Erika Oktavia	Wiraswasta	30 th	221.000.000	
12	Fauzan	Wiraswasta	35 th	278.000.000	
13	Hendry Heliyanto	Wiraswasta	39 th	11.500.000	BPKB
14	Heri Irawan	Wiraswasta	32 th	32.500.000	
15	Heriansyah	Wiraswasta	30 th	481.500.000	Sertifikat Rumah
16	Irwan Jauhari	Wiraswasta	45 th	42.000.000	
17	Megawati Oktora	Wiraswasta	33 th	30.625.000	
18	Miyanto	Wiraswasta	42 th	35.000.000	
19	Muhidin	Wiraswasta	40 th	118.000.000	
20	Okta Ferliansa	Wiraswasta	32 th	26.000.000	
21	Ratna Dewi	Wiraswasta	30 th	50.750.000	
22	Reni Friska	Wiraswasta	36 th	59.200.000	
23	Rokayaningsih	Wiraswasta	39 th	105.000.000	
24	Ruksiah	Wiraswasta	43 th	96.000.000	
25	Saepudin	Wiraswasta	40 th	33.000.000	
26	Suratinah	Wiraswasta	35 th	175.000.000	

27	Suratno	Wiraswasta	30 th	73.250.000	
28	Surya Melati	Wiraswasta	32 th	186.000.000	
29	Suryati	Wiraswasta	35 th	89.000.000	
30	Sutadi	Wiraswasta	30 th	24.750.000	BPKB
31	Ulfah Rahayu	Wiraswasta	29 th	265.000.000	Sertifikat Rumah
32	Zaini Indriyana	Wiraswasta	39 th	64.000.000	
33	Edi Sacra	Wiraswasta	34 th	121.000.000	
34	Efiarosa	Wiraswasta	36 th	50.400.000	Sertifikat Rumah
35	Samsudin	Wiraswasta	34 th	22.550.000	
37	Satia Indra Putra	Wiraswasta	45 th	218.766.664	
38	Somi Awan	Wiraswasta	39 th	12.492.434	
39	Suhendro Pratama	Wiraswasta	36 th	27.904.170	
40	Suparti	Wiraswasta	40 th	160.000.000	
41	Tuti Unida	Wiraswasta	30 th	259.200.000	
42	Mulyadi	Wiraswasta	38 th	5.750.000	BPKB
43	Mudiyati	Wiraswasta	37 th	113.925.000	Sertifikat Rumah
44	Supriyati	Wiraswasta	32 th	113.600.000	
45	Yuniarti	Wiraswasta	34 th	71.000.000	
46	Arasiyah	Wiraswasta	34 th	85.200.000	
47	Linda Ama	Wiraswasta	35 th	85.200.000	
48	Lestari Eriana	Wiraswasta	32 th	67.500.000	
49	Solekhah	Wiraswasta	30 th	28.400.000	
50	Masitoh	Wiraswasta	37 th	78.100.000	

Sumber Data: BPRS Bandar Lampung Tahun 2014-2018¹⁶

Karena adanya pembiayaan macet memotivasi bank berhati-hati dalam mengatur alokasi pembiayaan yang akan diberikan. Pengurangan resiko pembiayaan macet dapat diupayakan dalam meneliti penyebab terjadinya pembiayaan macet. sehingga rencana pembiayaan disusun lebih matang, analisis atas permohonan pembiayaan lebih terarah dan pengaman pembiayaan lebih diperhatikan, dan meningkatkan sietem pembinaan nasabah.

¹⁶Dephi Wibowo, Pemasaran 1....15 Oktober 2019.

Oleh karena itu untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pembiayaan masyarakat sehingga semua yang dilakukan dibutuhkan penyelesaian pembiayaan yang cukup baik untuk meminimalisir pembiayaan macet yang terus menerus terjadi.

Dalam ajaran Islam, konsep pembiayaan dapat dicermati dalam al-Qur'an al-Baqarah(2): 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS al-Baqarah (2) 280)

Tafsir dari Ibn Kathir menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan bersabar dalam menghadapi orang yang berhutang yang berada di dalam kesulitan yang tidak mempunyai sesuatu untuk membayar hutangnya. Tidak seperti apa yang berlaku pada zaman Jahiliyah, seseorang diantara mereka berkata kepada penghutang, "jika masa pelunasan hutangmu telah tiba, sama ada kamu membayarnya atau menambah bunganya." Kemudian Allah SWT menganjurkan penghapusan sebagian daripada hutang tersebut dan menilainya sebagian perbuatan baik dan mendapat pahala yang melimpah.¹⁷ Dari ayat diatas menjelaskan, Allah SWT memerintahkan untuk bersabar dalam menghadapi orang yang berhutang yang dalam kesulitan tidak mempunyai apa yang akan dibayarkannya untuk menutupi hutangnya. Jika

¹⁷Nik Mohd Zaim Bin Ab Rahim, Ishak Hj Suliaman & Munirah Abd Razzak, *Kesempitan Hidup Pengutang: Analisis Ayat 280 Surah Al-Baqarah*, Annual Internasional Qur'anic Conference, (2012), h. 117-118.

kita menghapuskan semua pokoknya dari tanggungan si penghutang, maka hal itu akan lebih baik bagi kita. Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN MACET DAN PENYELESAIANNYA PADA BANK SYARIAH (Studi Pada BPRS Bandar Lampung).**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah?
2. Bagaimana cara penyelesaian pembiayaan macet pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian pembiayaan macet pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Kemanfaatan yang dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi masyarakat apa faktor-faktor penyebab pembiayaan macet dan penyelesaiannya pada bank syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai perbankan syariah khususnya faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet dan penyelesaiannya pada bank syariah.

b. Bagi Akademisi

Tulisan ini dapat digunakan sebagai tambahan literature yang membantu menambah wawasan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet dan penyelesaiannya pada bank syariah dan dapat digunakan sebagai dasar perluasan refrensi bagi penelitian selanjutnya dengan kajian yang sama.

G. Metode Penelitian

Untuk menghindari dan memahami suatu permasalahan agar suatu penelitian yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang optimal sebagaimana diharapkan maka perlu dibagi seorang peneliti menggunakan suatu metode

dalam melaksanakan peneliti. Dalam peneliti ini digunakan metode pengumpulan data, sebelum menjelaskan metode tersebut akan diuraikan terlebih dahulu cara memperoleh data.

1. Jenis Dan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang diamati.¹⁸ Selain menggunakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan membaca, menelaah, dan mencatat bahan dari berbagai *literature* yang berhubungan langsung dan mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.¹⁹

Fenomena yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu fenomena yang terkait dengan penyebab terjadinya pembiayaan macet dan penyelesaiannya. Studi kasus adalah sebagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan beraneka sumber informasi.

¹⁸ J Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Karya, 2014), h. 3.

¹⁹ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 20.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat eksploratif. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk menentukan problematika-problematika baru.²⁰

2. Objek dan Sumber Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan siapa yang akan menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilaksanakan, biasa juga ditambahkan dengan hal-hal lain yang dianggap perlu.²¹

Objek penelitian ini yaitu BPRS Bandar Lampung.

b. Sumber Penelitian

Berdasarkan sumbernya data dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer data sekunder.

1. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Data primer Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Macet dan Penyelesaiannya Pada Bank Syariah (Studi Pada BPRS Bandar Lampung) melalui wawancara bersama pak depi wibowo bagian pemasaran 1.

²⁰ *Ibid*, h, 29.

²¹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 203.

2. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder dapat diperoleh instansi-instansi, perpustakaan, maupun pihak lainnya. Dalam hal ini data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui data-data dari berbagai literatur berupa al-Qur'an, buku-buku, artikel, dan jurnal yang terkait dengan substansi bahasan yang peneliti lakukan. Data peneliti yang diperoleh melalui laporan publikasi BPRS Bandar Lampung yang berupa buku atau catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek peneliti.²²Populasi dalam penelitian ini adalah pihak nasabah yang melakukan pembiayaan macet di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung tahun 2014-2018, jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan macet sebanyak 657 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana,

²² Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan atau Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 108.

tenaga dan waktu, maka penelitian ini dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.²³

Berdasarkan penentuan jumlah sampel dan sampling, menurut Suharsimi Arikunto jika subjek <100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah subjeknya besar atau >100, dapat diambil 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Pada penelitian ini tingkat kesalahan yang diambil sebesar 10% dari jumlah populasi sebanyak 657 nasabah, Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yaitu bertujuan agar data yang diperoleh nantinya agar bisa lebih *representative*.²⁴ Adapun kriteria dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah berdasarkan pekerjaan yaitu sebagai wiraswasta yang terdaftar di BPRS Bandar Lampung selama 5 tahun dari tahun 2014-2018 yang didapat sebanyak 50 nasabah dan 1 (satu) karyawan BPRS Bandar Lampung

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data. Adapun metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Mengutip dari Anwar Sutoyo pengertian “Observasi yaitu penelitian secara *sempit* dan *luas*. Dalam arti sempit, observasi berarti

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

²⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rienika Cipta, 2011), h. 97.

pengamatan secara langsung terhadap gejala yang diteliti, dalam arti luas, observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek yang diteliti”.²⁵ Dalam hal ini peneliti mendengar dan mengamati mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet dan penyelesaiannya pada bank syariah.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk Menggali data secara lisan.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis melakukan interview bebas dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa saja yang dikumpulkan. Wawancara dengan Bapak Dephi Wibowo bagian Pemasaran 1 di BPRS Bandar Lampung.

c. Kuisisioner

Kuisisioner adalah sejumlah daftar pertanyaan yang dikirimkan kepada para responden baik secara langsung maupun tidak langsung. Kuisisioner secara umum berupa pertanyaan atau pernyataan yang dijawab sesuai dengan bentuk angket yang diberikan.²⁷ Kuisisioner ditujukan kepada nasabah BPRS Bandar Lampung.

d. Dokumentasi

Analisis dokumen lebih mengarah pada bukti konkret. Dengan instrument ini, kita untuk menganalisa isi dari dokumen-dokumen yang

²⁵ Anwar Sutoyo, *Pemahaman Individu* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 69.

²⁶ V. Wiratna Sujarweni. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam penelitian*, (Yogyakarta, Andi Offset), h. 92.

²⁷<https://akuntanonline.com>, *Pengertian kuisisioner, Jenis dan Contohnya*

dapat mendukung penelitian kita.²⁸Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber dari dokumen tertulis maupun tidak tertulis yang sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan konkrit. Metode ini digunakan guna memperoleh data yang berhubungan dengan Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaiannya Pada Bank Syariah (Studi Pada BPRS Bandar Lampung).

5. Metode Pengolahan Data

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang analisa data nya di lakukan baik sebelum terjun langsung dilapangan, saat penelitian dilapangan dan saat setelah selesai memperoleh data dari lapangan. Analisa dan kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu suatu analisa berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.

Saat menganalisa data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari tempat penelitian data yang diperoleh dan tertitik tolak dan hal-hal yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum dan menyeluruh. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif dari tempat penelitian dengan berbagai instrument yang digunakan untuk memperoleh data tersebut. Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁸*Ibid* 95.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam reduksi data penelitian ini merangkum, menyortir hal-hal yang pokok, memilih dan fokus pada hal-hal yang penting, mencari pola dan tema dari penelitian tersebut. Dimana dalam teknik analisis ini harus memilih, menggolongkan, memfokuskan, memisahkan yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diperoleh dengan jelas dan diambil.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu teknik analisis yang penting dari penelitian kualitatif. Dimana sekumpulan data yang diperoleh peneliti dari instrument yang digunakan baik wawancara, observasi, dokumentasi ataupun kepustakaan dan disusun sedemikian rupa untuk menarik kesimpulan dan penarikan tindakan, yang disajikan antara lain dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan dan bagan.

c. Teknik Kesimpulan

Teknik kesimpulan dalam penelitian kualitatif selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Teknik ini merupakan salah satu dari teknik yang penting. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.²⁹

²⁹ Pungki Eko Winarto, “*Analisis Model Perhitungan Pentapan Biaya Premi Asuransi Syariah Dalam Hubungannya Dengan Segmentasi Pasar Dan Perusahaan*”, (Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019),h. 20-21.

6. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul melalui penggunaan metode yang ada, maka akan dianalisa dengan menggunakan data kualitatif yang dapat diartikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang dihasilkan dan deksriktif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁰



³⁰ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Alumni, Bandung, h. 4.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Kata bank itu sendiri berasal dari bahasa latin *banco* yang artinya bangku atau meja. Pada abad ke 12 kata *banco* merujuk pada meja, *counter* atau tempat penukaran uang (*money charnger*).³¹

Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.³²

Bank Islam atau disebut bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Antonio dan Perwaatmadja membedakan

³¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 58.

³² A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariaah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1.

menjadi dua pengertian, yaitu bank islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam; (2) adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-qur'an dan Hadis sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

2. Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah ialah bank yang berasaskan, antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik, antara lain, sebagai berikut:

- a) Pelanggaran riba dalam berbagai bentuknya
- b) Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*)
- c) Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
- d) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
- e) Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
- f) Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad³³

³³ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 2-5.

Bank Syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang di haramkan. Berbeda dengan bank non-syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa. Disamping itu, bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh *imbalan* atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini: transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman dan bukan termasuk riba, tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain, tidak ada unsur penipuan (*tadlis*), perjudian (*maysir*), tagrir (*gharar*), rekayasa pasar dalam supply (*istikhar*), rekayasa pasar dalam demand (*Bai'najasy*), suap menyuap (*rissyiwah*) dan tidak mengandung materi-materi yang diharamkan.³⁴

3. Dasar Hukum Bank Syariah

Eksistensi dari perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional didasari oleh kesadaran dan kebutuhan umat islam yang ingin menjalankan aktifitas ekonomi yang sesuai dengan tuntunan agama serta optimalisasi potensi ekonomi masyarakat luas. Kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan

³⁴ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 229.

lahirnya bank Islam atau bank syariah. Bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik dan eksistensinya pun semakin kuat dengan adanya landasan hukum perbankan syariah yang tertuang dalam undang-undang perbankan syariah, yaitu.³⁵ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah. Keberadaan bank syariah semakin mapan setelah diundangkannya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Bedasarkan pasal 4 UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga bisa menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmaal, yaitu yang menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau ta'zir) dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).³⁶

³⁵ Adiwarman Kariman, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h.25.

³⁶ Anan Dwi Sapitro, Moch. Dzulkirom, *Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vo.21 No. 2 (April 2015), h. 2.

Industri perbankan syariah nasional terus tumbuh dengan laju pertumbuhan bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi dan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangannya sejak tahun 1992. Sebelum disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Pbs), pengaturan tentang bank syariah di Indonesia masih menyatu dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP) dan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan beserta peraturan pelaksanaannya berupa peraturan pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, keputusan Direksi Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia, dan Surat Edaran Bank Indonesia.

Peraturan dalam UU tersebut masih dipandang belum kuat untuk menjadi landasan. Keadaan demikian mendorong Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI) mengeluarkan aturan dalam bentuk Peraturan BI dan Surat Edaran BI. Di antara peraturan BI 7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan Usaha berdasarkan prinsip syariah, serta PBI Nomor 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan Usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum Konvensional.

Seiring dengan semakin berkembangnya Bank Syariah di Indonesia, maka sejak tahun 2011 BI terus menambah PBI yang terkait dengan

regulasi, perbankan syariah setiap tahunnya. Bahkan setelah dengan kewenangan dan tanggung jawab membuat regulasi berpindah dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan-peraturan terkait bank Syariah pun terus dibuat. Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa OJK memiliki fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel khususnya dalam dunia perbankan.

Di sisi lain, munculah praktik ekonomi syariah di Indonesia pada tahun 1990-an membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganggap perlu dibentuk suatu badan dewan Syariah Nasional (DSN). Pembentukan institusi DSN ini diperlukan untuk megawasi dan mengarahkan institusi keuangan syariah, mengingat pesatnya laju pertumbuhan ekonomi syariah. Pembentuk DSN merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan . Karena DSN mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah, maka DSN diharapkan dapat mendorong pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.

Fatwa DSN memberikan pengaruh bagi tatanan social kemasyarakatan bangsa Indonesia. Hal ini menunjukan 2 (dua) makan penting. *Pertama*, fatwa-fatwa DSN memiliki makna penting dalam masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Kenyataan selama ini menunjukan meskipun fatwa

DSN tidak mengikat secara hukum, tetapi dalam prakteknya sering dijadikan rujukan berperilaku oleh masyarakat dan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. *Kedua*, Karena mempunyai efek dan pengaruh ke masyarakat demikian kuat, meniscayakan DSN untuk responsive atas dinamika dan kecenderungan di masyarakat, sehingga fatwa yang dikeluarkan dapat sejalan dengan kemaslahatan umat.

Lahirnya DSN yang kedudukannya diperkuat oleh UU Pbs sesungguhnya dapat menjadi landasan formal bagi kekuatan mengikat fatwa DSN bagi perilaku aktifitas ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah,. Fatwa DSN dapat dijadikan sebagai legitimasi bahwa produk perbankan syariah telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Sebagaimana nilai dan moralitas yang diinginkan oleh aktifitas ekonomi syariah. Namun saat ini masih muncul pemahaman bahwa fatwa DSN tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena dalam sistem hukum nasional dan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disebutkan dalam UU 12 Tahun 2011, tidak menyebutkan fatwa sebagian dasar hukum di Negara ini. Agar fatwa DSN dapat memiliki kekuatan, maka harus dituangkan ke dalam PBI, POJK dan SEOJK.³⁷

3. Prinsip-prinsip Dasar Bank Syariah

Prinsip dasar dalam menjalankan perbankan syariah menurut Antonio yaitu sebagai berikut:

³⁷ Agus Wahuyo, *Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 10 No. 2 (2016) , h. 518-520.

a) Prinsip titipan atau simpanan (*Al-wadi'ah*)

Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain.

b) Prinsip Bagi Hasil

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Akan tetapi prinsip yang paling banyak digunakan adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*. Sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus pembiayaan pertanian oleh bank Islam.

c) Prinsip Jual Beli

Ada tiga jenis jual beli yang telah dikembangkan sebagai dasar dalam pembiayaan kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu: *ba'al-murabahah*, *bai'as-salam*, *bai'al-istishna*.

d) Prinsip Sewa

Dalam perbankan syariah, prinsip sewa ada dua jenis, yaitu *Al-ijarah* dan *A-ijarah al muntahia bit-tamlik*.³⁸

Dari penjelasan diatas dapat dianalisa bahwa prinsip-prinsip Dasar Bank Syariah dalam menjalankan kegiatannya, yaitu prinsip titipan atau simpanan (*Al-wadi'ah*), prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dan prinsip sewa.

³⁸ *Ibid*, Anan Dwi Sapitro, Moch. Dzulkirom, *Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang....*h.2

4. Produk Bank Syariah

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. berikut ini jenis-jenis produk Bank Syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

a) *Al-Wadi'ah* (Simpanan)

Al-Wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.

b) Pembiayaan dengan Bagi Hasil

Penyaluran dana dalam bank konvensional, kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga, tetapi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil.

c) *Bai'al-Murabahah*

Bai'al-Murabah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

d) *Bai'as-Salam*

Bai'as-Salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.

e) *Bai' Al-Istihna'*

Ba'I Al-Istihna' adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang).

e) *Al-Ijarah (Leasing)*

Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

f) *Al-Wakalah (Amanat)*

Wakalah atau *wakilah* artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain.

g) *Al-Kafalah (Garansi)*

Al-Kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

h) *Al-Hawalah*

Al-Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

i) *Ar-Rahn*

Ar-Rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.³⁹

Dari penjelasan diatas dapat dianalisa bahwa jenis-jenis produk-produk Bank Syariah yang ditawarkan yaitu *Al-Wadi'ah* (simpanan), Pembiayaan

³⁹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), h. 168-176

bagi hasil, *Ba'al-Murabahah*, *Ba'as-Salam*, *Bai' Al-Istihna'*, *Al-Ijarah* (leasing), *Al-Wakalah* (amanat), *Al-kafalah* (garansi), *Al-hawalah*, *Ar-Rahn*.

5. Tujuan Perbankan Syariah

Tujuan perbankan syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten.

6. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah dan unit usaha syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai berikut:

- a) Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b) Menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelolaan zakat yang dimaksud dengan “Dana sosial lainnya”, adalah penerimaan bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap nasabah (*ta'zir*).
- c) Menghimpun dana sosial yang berasal dari waqaf uang yang menyalurkannya kepada pengelola waqaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi waqaf (*wakif*).⁴⁰

⁴⁰ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 26-27.

Dari penjelasan diatas dapat dianalisa bahwa fungsi utama Bank Syariah yang ditawarkan yaitu Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, Menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelolaan zakat, dan Menghimpun dana sosial yang berasal dari waqaf uang yang meyalurkannya kepada pengelola waqaf.

7. Jenis dan kegiatan Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya, Produk dan jasa bank syariah yang dapat diberikan kepada masyarakat tergantung jenis banknya yaitu sebagai berikut:

a) Bank Umum Syariah

Kegiatan bank umum syariah yaitu:

1) Menghimpun dana dari masyarakat

Bank umum syariah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis produk pendanaan antara lain giro *wadiah*, tabungan, *mudharabah* , deposito *mudharabah* dan produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengansyariah Islam.

2) Penyaluran dana ke masyarakat

Aktivitas penyaluran dana bank syariah akan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan bila menggunakan akad jual beli, bagi hasil bila gunakan akad kerja sama usaha, dan sewa bila menggunakan akad sewa menyewa.

3) Pelayanan Jasa

Bank umum syariah juga menawarkan produk pelayanan jasa untuk membantu transaksi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa bank syariah, Hasil yang diperoleh bank atas pelayanan jasa bank syariah yaitu pendapatan *fee* dan komisi.

b) Unit Usaha Syariah

Ativitas unit usaha syariah sama dengan aktivitas yang dilakukan oleh bank umum syariah, yaitu aktivitas dalam menawarkan produk penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya.

c) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

1) Penghimpunan dana masyarakat

BPRS mengimpon dana masyarakat dengan menawarkan produk tabungan *wadiah*, *mudharabah*, dan depositi *mudharabah*.

2) Penyaluran dana kepada masyarakat

BPRS menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan dan penempatan pada bank syariah lain atau BPRS lainnya. dari aktivitas penyaluran dana ini BPRS memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan yang berasal dari pembiayaan dengan akad jual

beli atau pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan kerja sama usaha.

3) BPRS tidak melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran

BPRS tidak melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran, oleh karena itu BPRS tidak diperbolehkan menawarkan produk giro *wadiah*. Hal ini yang membedakan antara bank umum syariah atau unit usaha syariah dengan BPRS.⁴¹

Dari penjelasan diatas dapat dianalisa bahwa jenis dan kegiatan Bank Syariah yaitu, Bank Umum Syariah kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat, penyaluran dana dari masyarakat dan pelayanan jasa, Unit Usaha Syariah kegiatannya dalam menawarkan produk penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bertugas menghimpun dana masyarakat, penyaluran dana dari masyarakat, dan BPRS tidak melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran. Hal ini yang membedakan antara bank umum syariah atau unit usaha syariah dengan BPRS.

8. Visi, Misi, dan Sasaran Bank Syariah

Bank syariah memiliki visi, misi dan sasaran yaitu sebagai berikut:

a) Visi Bank Syariah

Visi Bank syariah berbunyi: “Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang

⁴¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 51-55.

mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share-based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat”.

b) Misi Perbankan Syariah

Berdasarkan Visi dimaksud, misi yang menjelaskan peran Bank Indonesia adalah mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang istiqamah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan
- 2) Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya
- 3) Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan
- 4) Mendesain kerangka *entry* and *exit* perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan

c) Sasaran Perbankan Syariah

Bank Indonesia telah menentukan sasaran realistis untuk mewujudkan visi yang sudah dicanangkan, sehingga sasaran dibuat dengan mempertimbangkan kondisi faktual, termasuk faktor-faktor yang

memperngaruh dan kecenderungan akan membentuk industri di masa yang akan datang; manfaat dan tantangan yang ada; serta kelebihan dan kekurangan dari perilaku industri dan *stakeholder* lainnya.

- 1) Terpenuhiya prinsip syariah dalam operasional perbankan yang ditandai dengan: (i) tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam (standardisasi); (ii) terwujudnya mekanisme kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip syariah dalam operasional perbankan, baik instrument maupun badan terkait; (iii) rendahnya tingkatnya keluhan masyarakat dalam hal penerapan prinsip syariah dalam setiap transaksi.
- 2) Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah, yaitu (i) terwujudnya kerangka pengaturan dan pengawasan berbasis risiko yang sesuai dengan karakteristiknya dan didukung oleh sumber daya insani yang andal; (ii) diterapkannya konsep *corporate governance* dalam operasi perbankan syariah; (iii) diterapkannya kebijakan *exit* dan *entry* yang efisien; (iv) terwujudnya *real-time supervision*; (v) terwujudnya *self regulatory system*.
- 3) Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif, dan efisien, yang ditandai dengan: (i) terciptanya pemain-pemain yang mampu bersaing secara global; (ii) terwujudnya aliansi strategis yang efektif; (iii) terwujudnya mekanisme kerja sama dengan lembaga-lembaga pendukung.

4) Terciptanya stabilitas sistematis serta terrealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas, yang ditandai dengan; (i) terwujudnya *safety net* yang merupakan kesatuan dengan konsep operasional perbankan yang berhati-hati; (ii) terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan bank syariah di seluruh Indonesia dengan target pangsa besar 5% dari total aset perbankan nasional; (iii) terwujudnya fungsi perbankan syariah yang *kaffah* dan dapat melayani seluruh segmen masyarakat; (iv) meningkatnya proposal pola pembiayaan secara bagi hasil.

Berdasarkan visi, misi dan sasaran perbankan syariah yang diungkapkan di atas, mempedomi nilai-nilai dasar ajaran agama Islam yang pada pelaksanaannya harus melalui penghayatan dan penerapan dalam setiap kegiatan operasionalnya. Sasaran pengembangan ditetapkan setelah mengakomodasi kondisi aktual dalam industri perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam upaya pencapaian sasaran⁴².

Dari penjelasan di atas dapat dianalisa bahwa Visi, Misi, dan Sasaran Bank Syariah yaitu Misi Bank Syariah Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share-based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong menuju

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 8-9

kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat, Misi Bank Syariah mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang istiqamah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, Sasaran Bank Syariah sasaran dibuat dengan mempertimbangkan kondisi faktual, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi dan kecenderungan akan membentuk industri di masa yang akan datang.

B. BPRS

1. Pengertian BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

BPRS adalah lembaga keuangan yang berbetuk bank dengan sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Pada sistem perbankan Nasional, BPRS hanya terfokus pada melayani Usaha Mikro, dan Kecil (UMK) yang memiliki proses mudah, pelayanan cepat, dan persyaratan mudah. Hal-hal semacam inilah yang kemudian membuat BPRS mempunyai pangsa pasar yang berbeda dengan Bank Syariah dan lembaga keuangan lainnya.⁴³

2. Dasar Hukum BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang N0.7 Tahun 1992 tentang perbankan merupakan sumber hukum yang utama bagi pengaturan kehidupan perbankan Islam di Indonesia. Sepanjang yang menyangkut ketentuan mengenai bank perkreditan rakyat

⁴³ Mahmud Fauzi, *Efisiensi bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) di provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Vol. 4, 1, (Januari 2018), h. 32

yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah atau disingkat bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) Yang diatur dalam Undang-undang itu telah memperoleh peraturan pelaksanaan berupa surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 12 Mei 1999. Selanjutnya dalam bab ini surat keputusan direksi tersebut DIR BI32/36/1999.⁴⁴

Dari penjelasan diatas dapat di analisa bahwa Dasar Hukum BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) yaitu dalam Undang-undang memperoleh peraturan pelaksanaan berupa surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 12 Mei 1999. Selanjutnya dalam bab ini surat keputusan direksi tersebut SK DIR BI32/36/1999.

3. Kegiatan Usaha dan Produk-Produk BPRS

Sebagai lembaga keuangan pada dasarnya BPRS dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank umum syariah pada pasal 21 Undang-Undang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

- 1) Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), h. 159.

- 2) Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- b) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk
- 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*
 - 2) Pembiayaan berdasarkan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*
 - 3) Pembiayaan berdasarkan akad *Qardh*
 - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa dalam bentuk *ijarah muntahiyabittamlik*
 - 5) Pengambilan utang berdasarkan Akad *hawalah*
- c) Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- d) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS
- e) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia

Pada pasal 25 UU Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang

- a) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah
- b) Menerima simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- c) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia
- d) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- e) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21.⁴⁵

Dari penjelasan diatas dapat di analisa bahwa Kegiatan Bank Perkreditan (BPR) Syariah yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana kepada masyarakat, menempatkan dana pada bank syariah lain, memindahkan uang, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia

⁴⁵ N Haida, *Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah , (2016), h. 200-201.

4. Kepengurusan BPR Syariah

Kepengurusan BPR Syariah terdiri dari dari direksi dan komisaris, Anggota direksi dan dewan komisaris wajib memenuhi persyaratan a). kompetisi, b) integritas, dan c) reputasi keuangan

a) Dewan Komisaris

1) Jumlah anggota dewan komisaris sekurang-kurangnya dua orang dan sebanyak-banyaknya tiga orang

2) Sekurang-kurangnya satu orang anggota dewan komisaris wajib berdomisili dekat tempat kedudukan BPRS

3) Anggota dewan komisaris wajib memiliki pengetahuan dan aatau pengalaman di bidang perbankan atau di bidang keuangan lainnya

4) Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatannya sebagai:

4.1 anggota dewan komisaris sebanyak-banyaknya pada tiga bank lain, atau

4.2 anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif yang memerlukan tanggung jawab sebanya-banyaknya pada dua lembaga/perusahaan lainbukan bank

b) Dewan Direksi

1) Jumlah anggota direksi sekurang-kurangnya 2 orang

2) Sekurang-kurangnya 50 persen dari anggota direksi termasuk direktur utama wajib berpengalaman operasional sekurang-kurangnya:

- 2.1 satu tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau pembiayaan di perbankan syariah, atau
- 2.2 empat tahun sebagai pegawai di bidang pendanaan dan pembiayaan di perbankan syariah, atau
- 2.3 dua tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah
- 3) Anggota direksi sekurang-kurangnya berpendidikan formal minimal setingkat Diploma III atau Sarjana Muda
- 4) Anggota direksi lain yang belum berpengalaman perbankan syariah wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah
- 5) Direktur utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali
- 6) Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan, atau lembaga lain
- 6.1 Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
- 6.2 Seluruh anggota direksi harus berdomisili dekat dengan tempat kedudukan kantor pusat BPRS⁴⁶

⁴⁶ Veithzal, Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan dari teori ke praktik*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 18-19.

c) Dewan Pengurus Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan syariah. DPS adalah bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. Karena peranan yang penting dalam DPS, kedua undang-undang di Indonesia termasuk kebutuhan DPS dalam perusahaan berdasarkan syariah dan institusi perbankan syariah yaitu Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Oleh karena itu, secara yuridis Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada institusi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat kuat, karena kehadirannya adalah sangat penting dan strategis.

Pengoptimalan peranan DPS adalah sangat penting untuk memastikan setiap transaksi sesuai prinsip-prinsip syariah yang menunjuk kepada al-Qur'an dan Sunnah, dalam hal ini, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pedoman dasar DSN MUI Ban IV ayat (2) menyatakan bahwa DSN MUI mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di setiap institusi keuangan syariah dan menjadi dasar bagi para pihak untuk mengambil tindakan hukum yang berkaitan, yaitu berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI dirujuk oleh DPS. DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa syariah terhadap jenis-jenis kegiatan,

produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan di Indonesia . Disamping itu, peran DPS dan DSN bukan hanya mengawasi operasional lembaga keuangan syariah saja, tetapi memiliki peran yang lebih besar lagi yaitu turut mendorong tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.⁴⁷

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis, bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi), pelaku dalam menjalankan bisnisnya sumber modal, jika pelaku tidak memiliki modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank, bank mendapatkan sumber dana dengan melakukan pembiayaan.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendana yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁴⁸

⁴⁷ Bgya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal & Jasri Bin Jamal, *Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Keputusan Syariah di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 24 No. 1 (Januari 2017), h. 118-119.

⁴⁸ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2016), h. 40-48.

Dari penjelasan diatas dapat di analisa bahwa Pembiayaan atau *financing* yaitu aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah.

2) Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah berkait dengan *stakeholder* yaitu sebagai berikut:

a) Pemilik

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

b) Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelola.

c) Masyarakat

1) Pemilik dana

Pemilik dana dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil

2) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkan umumnya-konsumen

3) Masyarakat umumnya konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya

d) Pemerintah

Adanya penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

e) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.⁴⁹

Dari penjelasan diatas dapat di analisa bahwa tujuan pembiayaan yaitu pemilik, mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan, Pegawai mengharapkan memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelola, Masyarakat pemilik dana-dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil, Debitur yang bersangkutan terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya, masyarakat umumnya konsumen memperoleh barang-barang dibutuhkannya, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, Bank penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya.

⁴⁹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 303-304.

3. Produk Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan bank syariah ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investmen financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor).

Produk-produk pembiayaan bank syariah sebagai berikut:

a) Bagi hasil, untuk *investmen financing*:

1) *Musyarakah*

2) *Mudharabah*

b) Jual beli, untuk *trade financing*:

1) *Murabahah*

2) *Salam*

3) *Istishna*

c) Sewa, untuk *trade financing*

1) *Ijarah*

2) *Ijarah muntahiya bitamlik*

d) Pinjaman, untuk dana talangan:

1) *Qardh*

Tiga produk pembiayaan utama yang mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang dan properti.⁵⁰

⁵⁰Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 123.

Dari penjelasan diatas dapat di analisa bahwa produk pembiayaan yaitu Bagi hasil, Jual beli, Sewa dan Pinjaman.

4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, Terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi, apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga, Oleh karena itu, dalam pemberian kreditnya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar.

- a) karakter adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur
- b) Analisis kemampuan (*ability*), yaitu penilaian bank terhadap kemampuan calon debitur untuk melunasi kewajiban-kewajibannya
- c) Analisis permodalan (*capital*), yaitu penilaian pihak bank terhadap jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur
- d) Analisis jaminan (*collateral*), yaitu penilaian pihak bank terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya
- e) Analisis kondisi atau prospek usaha (*condition of economies*), yaitu analisis terhadap situasi dan kondisi perekonomian makro dan pengaruhnya perkembangan usaha calon debitur⁵¹

⁵¹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 101.

Dari penjelasan diatas dapat di analisa bahwa prinsip-prinsip pembiayaan yaitu karakter, analisis kemampuan (*ability*), analisis permodalan (*capital*), analisis jaminan (*collateral*), analisis kondisi atau prospek usaha (*conditioning of economies*).

5. Pengertian Pembiayaan Macet

Pembiayaan macet adalah Pembiayaan bermasalah dimana karena suatu hal seorang debitur mengingkari janji mereka membayar pembiayaan yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan atau sama sekali tidak ada pembayaran.⁵²

Dari penjelasan diatas dapat di analisa bahwa pembiayaan macet yaitu adanya keterlambatan dalam membayar angsuran yang telah jatuh tempo.

6. Penyebab Pembiayaan Macet

Untuk menghindari risiko kerugian, bank syariah dan unit usaha syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaannya. Salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan bank syariah dan unit usaha syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang memiliki prospek yang memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan membayar.faktor-faktor penyebab pembiayaan macet faktor internal dan eksternal.⁵³

⁵² Nugrahini Kusumawati Jimmi, *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Tingkat Kredit Macet Dalam Proses Pembiayaan Sepeda Motor PT Radana Finance*, Jurnal Akuntansi, Vol. 2 No. 1(Juli 2015), h. 74.

⁵³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), h. 108.

a) Faktor internal yaitu faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri

Kemampuan dan naluri bisnis Analisis Pembiayaan belum memadai

- 1) Analisis pembiayaan tidak memiliki integritas yang baik
- 2) Para anggota komite pembiayaan tidak mandiri
- 3) Pemutus pembiayaan “takluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal
- 4) Pengawasan bank setelah pembiayaan diberikan tidak memadai
- 5) Pemberian pembiayaan yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya
- 6) Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan pembiayaan yang baik
- 7) Pejabat bank, baik yang melakukan analisis pembiayaan maupun yang terlibat dalam keputusan pembiayaan, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha/proyek yang dimintakan kredit oleh calon nasabah.
- 8) Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon debitur.⁵⁴

b) Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain, sebagai berikut:

⁵⁴ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta:PT Gramedia, 2012), h. 92-92.

- 1) Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan, atau merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi
- 2) Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani
- 3) Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur
- 4) Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain
- 5) Kesulitan likuiditas keuangan yang serius
- 6) Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam
- 7) Watak buruk debitur (yang dari semula telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit)⁵⁵

Dari penjelasan diatas dapat di analisa bahwa penyebab pembiayaan macet yaitu faktor internal yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor eksternal berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi.

⁵⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 207-208.

7. Penyelesaian Pembiayaan Macet

Berdasarkan pasal 1 angka 7 PBI No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit usaha Syariah, yang dimaksudkan dengan restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain sebagai berikut:

- a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
- b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada bank
- c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain:
 - 1) Penambahan dana fasilitas bank
 - 2) Konversi akad pembiayaan
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah

4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.⁵⁶

Dari penjelasan diatas dapat di analisa bahwa penyelesaian pembiayaan macet yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*).

D. Kerangka Pikir

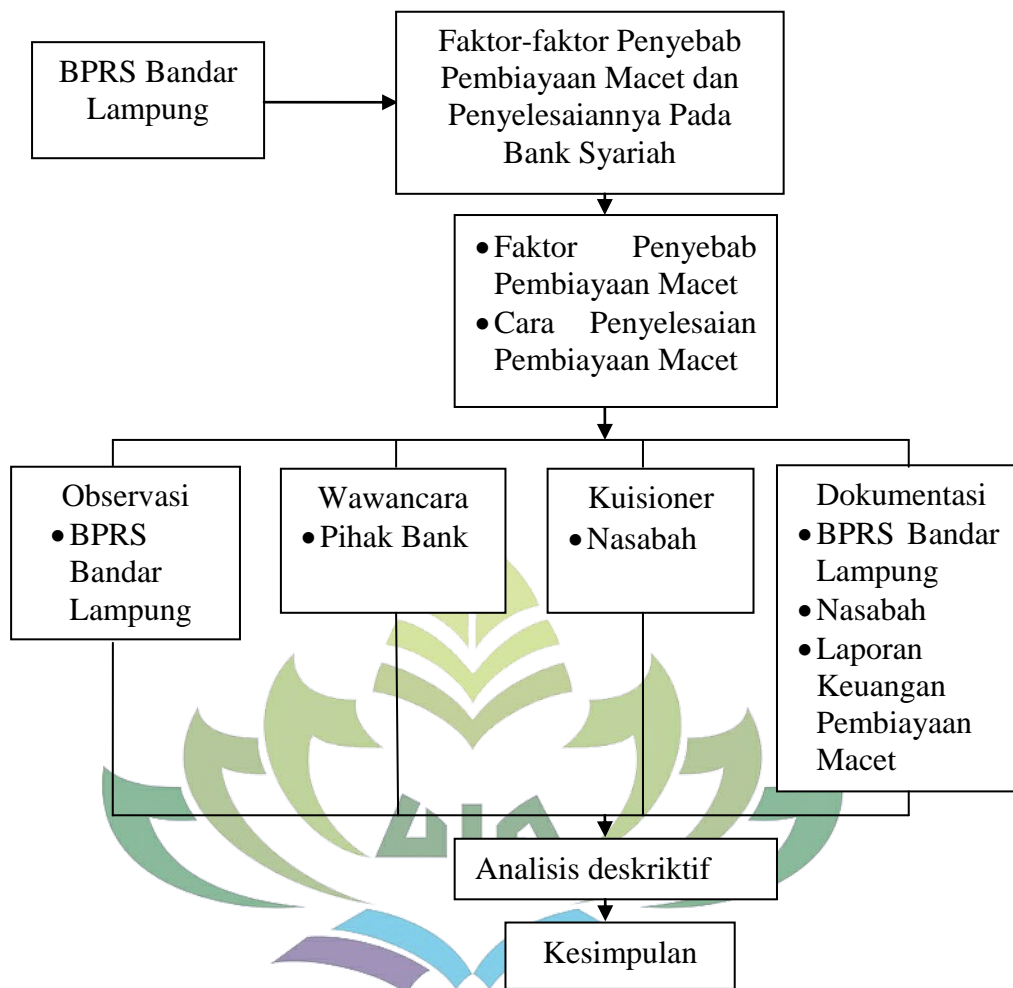
Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel indenpenden dan variabel dependen.⁵⁷

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapatkan kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁵⁸

⁵⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakara:Prenadamedia Group,2014), h. 433-434.

⁵⁷ Monle Lee & Charla Jhobson. *Prinsip-Prinsip Pokok Periklanan Dalam Perspektif Global*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 334.

⁵⁸ *Ibid*, h. 105-106.



Sumber Data: BPRS Bandar Lampung

Gambar 1. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini penulis akan mendiskripsikan teori dan pemahaman tentang faktor-faktor penyebab pembiayaan macet dan penyelesaiannya awal untuk menjelaskan tujuan penelitian. Kemudian pengumpulan data melalui observasi pada BPRS Bandar Lampung, Wawancara dengan pihak Bank dan kuisisioner kepada nasabah, Dokumentasi BPRS, nasabah, dan laporan keuangan pembiayaan Macet, yang akan menggunakan analisis deksriptif dan ditarik kesimpulan.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan para peneliti ini:

1. Azharsyah Ibrahim, Arinal Rahmati (2017)

Peneliti yang berjudul “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Metode pengolahan data yaitu kualitatif. Hasil Analisis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Kebijakan yang diterapkan untuk memperbaiki kualitas pembayaran dan mengurangi NPF dimulai dari upaya pencegahan sampai dengan upaya penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Secara spesifik kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMI dilakukan melalui OTS, penagihan, somasi, restrukturisasi, penjualan, jaminan melakukan write off dan adanya penetapan terhadap denda serta pembentukan tim khusus yang menangani pembiayaan bermasalah⁵⁹

2. Komang Tri Wahyuni, Desak Nyoman Sri Werastuti (2013)

Peneliti yang berjudul “Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT Bank Syariah Mandiri Buleleng”. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Metode pengolahan data yaitu kualitatif. Hasil Analisis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang digunakan telah memadai, demikian pula dengan analisis permohonan pembiayaan yang

⁵⁹ Azharsyah Ibrahim, Arinal Rahmati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.10 No.1 (2017), h. 93.

cukup selektif dilakukan upaya untuk menghindari adanya kredit bermasalah. Prosedur penagihan digunakan cukup baik karena terlebih dahulu dilakukan pendekatan-pendekatan kepada nasabah, Penyelesaian kredit bermasalah pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng dapat dilakukan dengan restrukturisasi pembiayaan, novasi, konvensasi, dan subrogasi, serta penyelesaian pembiayaan pada penagihan.⁶⁰

3. Tavitri Rangkuti (2018)

Peneliti yang berjudul “Pengaruh Analisis Kredit Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Kredit Macet) Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani Cikarang, Jawa Barat”. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Metode pengolahan data yaitu kualitatif. Hasil analisis yang telah dilakukan Bahwa kredit memberikan nilai kontribusi variable X terhadap variable Y adalah sebesar 52,99% . Nilai menunjukkan bahwa analisis kredit memberikan nilai kontribusi cukup besar yaitu 52,99% terhadap persetujuan pembiayaan dan 47,01% menunjukkan bahwa ada variable lain yang mempengaruhi⁶¹

4. Fuad Riyanti & Sri Puji Lestari (2017)

Penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus”. Metode analisis yang digunakan adalah

⁶⁰ Komang Tri Wahyuni, Desak Nyoman Sri werastuti, *Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng*, Jurnal Jurusan Akuntansi, Vol.2 No.2 (Oktober 2013), h. 190-191.

⁶¹ Tavitri Rangkuti, *Pengaruh Analisis Kredit Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Kredit Macet) Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ARTHA Madani Cikarang, Jawa Barat*, Jurnal Transparansi Vol.1 No.1 (Juni 2018), h. 84.

analisis deskriptif. Metode pengolahan data yaitu kualitatif. dari hasil penelitian menunjukan bahwa, penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT BUS cabang Mijen Kudus dalam menangani pembiayaan mudharabah bermasalah, antara lain: (1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya yang meliputi: perubahan *grade period*, perubahan jadwal pembayaran, perubahan jangka waktu, dan perubahan jumlah angsuran, (2) Pemberian keringanan angsuran dilakukan oleh BMT BUS dengan maksud agar *mudharib* bisa mengembalikan modal yang telah disalurkan oleh *shahibul maal* setelah waktu yang telah ditentukan tidak bisa mengembalikan, pemberian keringanan angsuran yang dimaksud untuk memberikan kemudahan bagi anggota agar mengembalikan modalnya setelah masa jatuh tempo yang ditentukan lewat telepon. (3) Upaya dengan eksekusi jaminan ini dilakukan oleh BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus dengan maksud agar modal yang telah disalurkan bisa kembali dan bisa memberikan efek jera kepada anggota agar hal serupa tidak terulang lagi dikemudian hari.⁶²

5. Odi Nur arifah (2017)

Penelitian yang berjudul “analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BMT Mitra Hasanah Semarang”. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Metode pengolahan data yaitu kualitatif. Hasil analisis yang telah dilakukan berdasarkan hasil analisa deskriptif terhadap

⁶² Fuad Riyadi & Sri Puji Lestari, *Analisis Implementasi Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 5 No. 2 (Desember 2017), h. 359.

data yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan selama melakukan magang tematik di BMT Mitra Hasanah dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Pembiayaan Mudharabah dapat menjadi bermasalah karena beberapa faktor eksternal, (2) Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan adalah sering dan senantiasa datang ke anggota, mencari penyebab permasalahannya dengan 3R (*Recheling, Reconditioning, Restructring*).⁶³

Dari sekian beberapa penelitian diatas belum ditemukan pembahasan yang fokus pada penelitian ini. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas lebih mengenai Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaiannya Pada Bank Syariah, dimana objek tempat penelitian dilakukan pada BPRS Bandar Lampung.



⁶³ Odi Nur Afifah, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BMT Mitra Hasanah Semarang*, Jurnal Akuntansi, Vol.7 No.1 (Juni 2017), h. 46.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Arikanto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan atau Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Djamil Faturahman *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syri'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Judiseno Rimsky K., *system Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008)
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta :RajaGrafindo Persada, 2012)
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012)
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2015)
- Kariman Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014)
- Lee Monle & Jhobson Charla. *Prinsip-Prinsip Pokok Periklanan Dalam Perspektif Global*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Meleong J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Karya, 2014)

Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004).

Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014)

Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014)

Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2016)

Poerwardamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011)

Poerwardamita W.J.S Poerwardamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, :Balai Pustaka Utara, 2011)

Purhantara Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

Soemitra Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rienika Cipta, 2011)

Sudjana Nana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Alumni, (Bandung)

Sutoyo Anwar, *Pemahaman Individu* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016)

Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005)

Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

Sujarweni V. Wiratna. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam penelitian*, (Yogyakarta, Andi Offset)

Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005)

Umam Khotibul, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016)

Veithzal, Basir Sofyan, Sudarto Sarwono, *Commercial Bank Manajement Manajemen Perbankan dari teori ke praktik*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013)

Wangsawidjaja A., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012)

Z Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta:PT Gramedia, 2012)

Jurnal dan lainnya

Ab Rahim Nik Mohd Zaim Bin, Suliaman Ishak Hj & Razzak Munirah Abd, *Kesempitan Hidup Pengutang: Analisis Ayat 280 Surah Al-Baqarah*, Annual Internasional Qur'anic Conference, (2012)

Afifah Odi Nur, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BMT Mitra Hasanah Semarang*, Jurnal Akuntansi, Vol.7 No.1 (Juni 2017)

Fauzi Mahmud, *Efisiensi bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) di provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Vol. 4, 1, (Januari 2018)

Haida N, *Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, (2016)

Ibrahim Azharsyah, Rahmati Arinal, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.10 No.1 (2017)

Jimmi, Nugrahini Kusumawati, *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Tingkat Kredit Macet Dalam Proses Pembiayaan Sepeda Motor PT Radana Finance*, Jurnal Akuntansi, Vol. 2 No. 1 (Juli 2015)

Prabowo Bgya Agung & Jamal Jasri Bin, *Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Keputusan Syariah di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 24 No. 1 (Januari 2017)

Rangkuti Tavitri, *Pengaruh Analisis Kredit Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Kredit Macet) Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ARTHA Madani Cikarang, Jawa Barat*, Jurnal Transparasni Vol.1 No.1 (Juni 2018)

Ridwansyah, *Mengenal Istilah-istilah Dalam Perbankan Syariah*, (Bandar Lampung Anugrah Utama Raharja, 2012)

Riyadi Fuad & Lestari Sri Puji, *Analisis Implementasi Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 5 No. 2 (Desember 2017)

Saputro Anan Dwi, A.R, Moch Dzulkirom. *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.21 No.2 (April 2015)

Sari Nurma. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jurnal IAIN Pontianak, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak, No. (2016)

Wahuyo Agus, *Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 10 No. 2 (2016)

Wahyuni Komang Tri, werastuti Desak Nyoman Sri, *Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng*, Jurnal Jurusan Akuntansi, Vol.2 No.2 (Oktober 2013)

Winarto Pungki Eko, “*Analisis Model Perhitungan Pentapan Biaya Premi Asuransi Syariah Dalam Hubungannya Dengan Segmentasi Pasar Dan Perusahaan*”, (Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

Wawancara

Wibowo Dhepi, Pemasaran 1, *Wawancara*, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bandar Lampung, 15 Oktober 2019.

Sumber Online

<https://akuntanonline.com>, *Pengertian* kuisisioner, Jenis dan Contohnya

<https://radarlampung.co.id> BPRS Bandar Lampung Makin Komitmen Berikan Produk Perbankan Syariah diunduh tanggal 15 Oktober 2019 di Sukarame, Bandar Lampung.